

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan tentang pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut harus dapat diimplementasikan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, setiap proses penyelenggaraan pemerintahan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma sosial. Hasil pemerintahan yang baik, terukur melalui indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menyadari arti pentingnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, harus mampu menjabarkan RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih jeneral serta tujuan yang lebih kompleks.

Sedangkan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen rencana pembangunan

berdimensi satu tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik yang sudah dicapai sesuai dengan tupoksi. Rencana Kinerja (Renja) ditetapkan untuk menjadi dasar penyusunan RKA-DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Kerja (Renja) menggambarkan berbagai indikator yang diklasifikasikan sehingga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja merupakan program kinerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menjadi komitmen bersama bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DLHK TAHUN 2020, memuat evaluasi pelaksanaan renja DLHK Tahun 2020 dan capaian Renstra DLHK, analisis kinerja pelayanan DLHK, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLHK, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja DLH, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta besaran pendanaannya.

BAB V : PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DLHK TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DLHK

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja renstra didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renstra dan digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat.

Secara garis besar, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran					Persentase Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	61,10	50,00	81,83	Baik
		Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	84,20	88,80	105,46	Sangat Baik
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	89,12	89,12*	100	Sangat Baik

Sedangkan Evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di bawah ini :

Tabel 2.2 :
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	61,10	50,00	81,83	61,15	81,77
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	84,20	88,80	105,46	84,98	104,49
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	89,12*	100	90,12	98,89
Rata-rata Capaian Kinerja					98,26		97,55

Indikator (1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2020 adalah sebesar 50,00. Sehingga persentase capaian kinerjanya 81,83% jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	61,10	50,00	81,83	61,15	81,77

Realisasi kinerja tahun ini menurun 11 Point, sehingga terjadi penurunan kinerja sebesar 18,08 % jika dibandingkan dengan realisasi

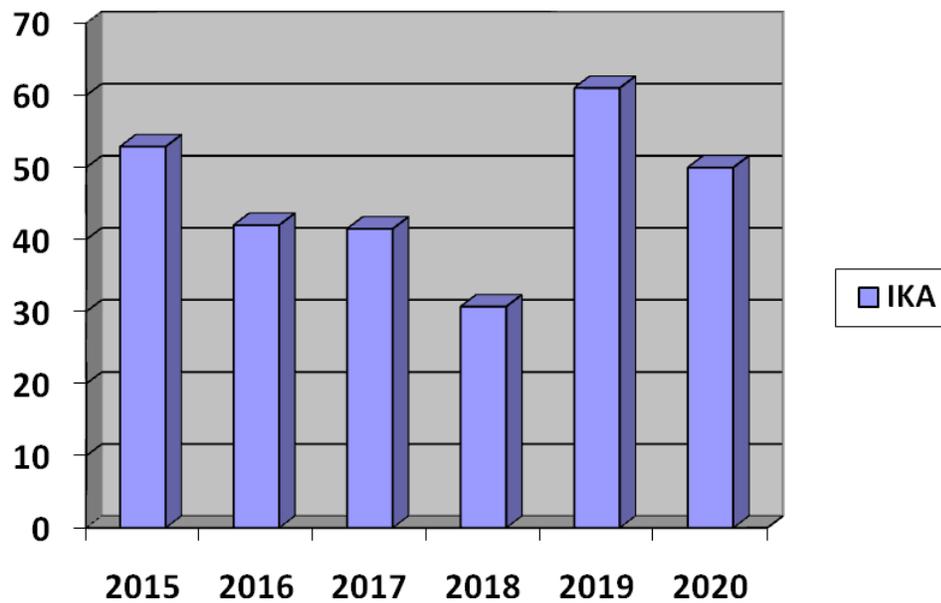
tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 sudah mencapai kinerja sebesar 81,77 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2016	52,9	42,01	79,41
2	2017	53	41,50	78,30
3	2018	54	30,71	56,87
4	2019	55	61,04	110,98
5	2020	61,10	50,00	81,83

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 adalah sebesar 88,80. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,46 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	84,20	88,80	105,46	84,98	104,49

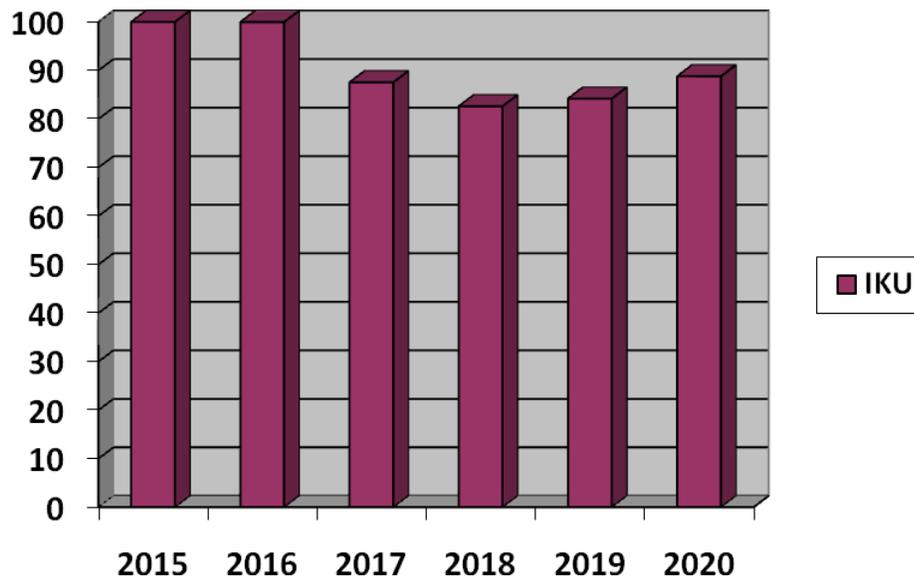
Realisasi kinerja Tahun ini meningkat 4 Point, sehingga terjadi peningkatan kinerja sebesar 5,47 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Udara tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, maka capaian kinerjanya mencapai 104,49 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk

mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	84,19	84,20
5	2020	84,20	88,80	105,46

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (1.2) Indeks kualitas udara

Capaian kinerja nyata indikator Indeks kualitas udara pada tahun 2019 adalah sebesar 82,62. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 99,98, maka persentase capaian kerjanya adalah

82,64 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

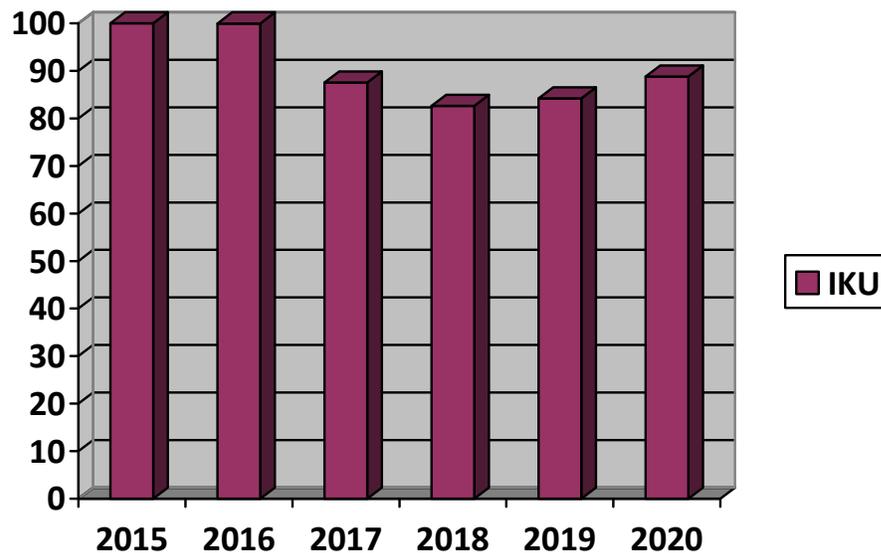
Realisasi kinerja tahun ini sebesar 82,62 sama/tetap, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya juga mencapai 82,62 Adapun capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara tahun ini sebesar 82,64 % sama/tetap, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 82,64 % yang juga belum memenuhi target.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 :
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	82,62	82,64

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2020 adalah sebesar 89,12. Sehingga persentase capaian kerjanya 100 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

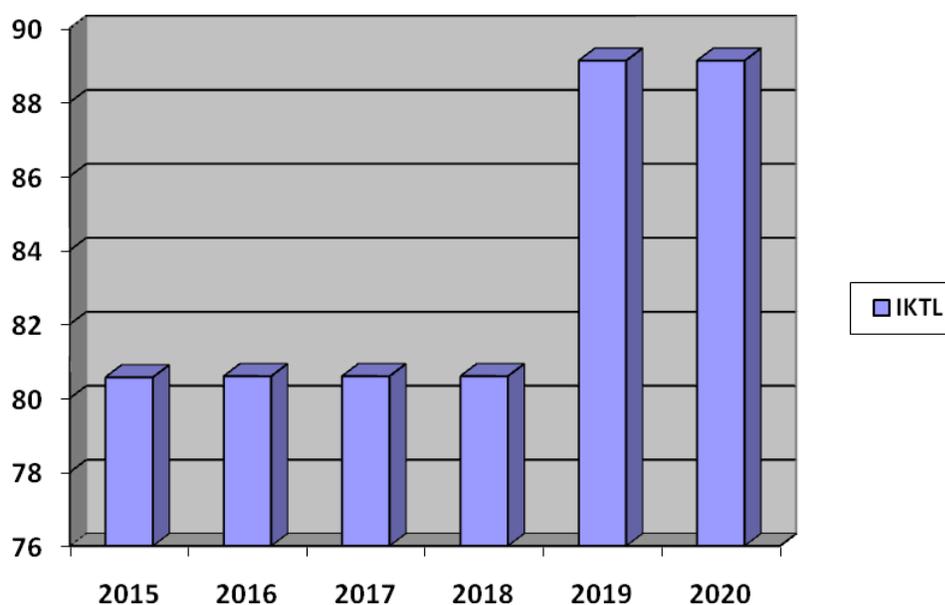
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	89,12*	100	90,12	98,89

Realisasi kinerja tahun ini tetap, sehingga tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 mencapai kinerja sebesar 98,89 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Tahun Renstra	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2016	70,54	80,59	114,25
2	2017	70,60	80,59	114,15
3	2018	70,67	80,59	114,04
4	2019	70,74	89,12	125,98
5	2020	89,12	89,12*	100,00

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, maka dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%) \\
 &= (50,00 \times 0,376) + (88,80 \times 0,405) + (89,12 \times 0,219) \\
 &= (18,80) + (35,96) + (19,52) \\
 &= \mathbf{74,28}
 \end{aligned}$$

IKLH pada Tahun 2020 ini didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 74,28, Indeks Kualitas Udara (IKU) 50,00, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 89,12. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

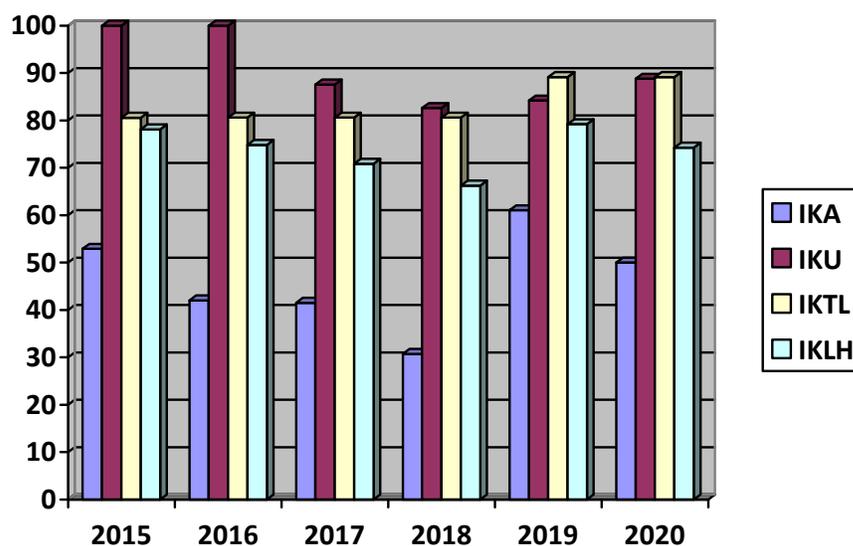
Tabel 2.7 :
Data perbandingan IKA, IKU, IKTL, IKLH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Tahun 2015 s/d Tahun 2020

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2015	52,90	99,98	80,56	78,08

2016	42,01	99,97	80,59	74,83
2017	41,50	87,55	80,59	70,86
2018	30,71	82,62	80,59	66,23
2019	61,04	84,19	89,12	79,21
2020	50,00	88,80	89,12*	74,28

Sumber : DLHK Tahun 2020

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 s/d 2020, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Bank Sampah yang dikelola secara aktif;
2. Adanya program pemerintah dalam mewujudkan Kota Sehat/Adipura;
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Bupati tentang JAKSTARADA dan Perbup tentang Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah;
2. Tidak adanya keseimbangan antara penanaman pohon dengan sumber kadar karbon monoksida (CO);
3. Banyaknya pemakaian pupuk pestisida dalam sektor pertanian;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana persampahan, baik kualitas maupun kuantitas..

Untuk lebih jelasnya, Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sesuai Format terlampir pada Juknis.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra DLHK s/d Tahun 2020
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/4)
211	Urusan Lingkungan Hidup									
	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penurunan pencemaran dari sektor usaha dan RT	7%	5%	7%	7,6%	108,57	1%	7,6%	108,57
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Prasana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	3.820 unit	3.903 unit	696 unit	694 unit	99,71	27 unit	3.930 unit	102,88
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah sarana prasarana	62 Unit	32 unit	1 unit	1 unit	100,00	0 unit	33 unit	53,23

			Prasarana dan Sarana Persampahan	yang beroperasi dan terawat								
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah aparatur persampahan yang terlatih	450 orang	225 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	225 orang	50,00
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah produk hukum pengelolaan persampahan yang disosialisasikan	3 buah	2 buah	0 buah	0 buah	0	0 orang	2 buah	66,67
			Penanganan Kebersihan Kota	Jumlah sampah yang tertangani	6.000 Ton	5.000 ton	5.000 ton	5.449,95 ton	109,00	7,500 ton	7.500 ton	125,00
			Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan TPA	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan TPA	42 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	5 unit	11,90
			Pengolahan Sampah terpadu	Jumlah volume sampah yang dikelola	700 Ton	633 Ton	500 ton	549,31 ton	109,86	633 ton	633 ton	90,43
			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	67 %	25%	67%	64%	95,52	7,16	64%	95,52
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Lokasi titik pantau yang memenuhi kriteria/nilai standar	100 lokasi	65 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	0 lokasi	66 lokasi	66,00

				adipura									
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina/dipantau	20 buah	15 buah	3 buah	3 buah	100,00	5 buah	23 buah	115,00
				Pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah lokasi/kelompok yang ditanami pohon	63 Lokasi	36 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100,00	0 lokasi	41 lokasi	65,08
				Penanggulangan kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi penanggulangan kerusakan lingkungan	60 lokasi	23 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	0 lokasi	24 lokasi	40,00
				Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah sarana prasarana pengendalian fungsi LH	65 unit	35 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	35 unit	53,85
				Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan hidup (DAK)	Jumlah alat uji kualitas air	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	6 unit	100,00
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas lingkungannya	45 lokasi	26 lokasi	20 lokasi	27 lokasi	135,00	0 lokasi	53 lokasi	117,78
				Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Cakupan kawasan wisata alam yang lestari	70%	20%	65%	65%	100,00	0%	65%	92,86

				Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air	Jumlah lokasi sumber mata air yang dikonservasi	10 lokasi	6 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	6 lokasi	60,00
				Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Jumlah bibit tanaman untuk konservasi	345.869 pohon	308.770 pohon	122.596 pohon	122.596 pohon	100,00	0 pohon	431.366 pohon	124,72
				Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah spesies flora fauna local yang dikonservasi	4 spesies	2 spesies	1 spesies	1 spesies	100,00	0 spesies	3 spesies	75,00
				Perencanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati	Jumlah taman keanekaragaman hayati yang dikembangkan	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	0 lokasi	2 lokasi	100,00
				Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Presentase sumber daya alam yang direhabilitasi	50%	25%	40%	40%	100,00	0%	40%	80,00
				Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	Jumlah transplantasi karang	6 lokasi	3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	0 lokasi	4 lokasi	66,67
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Presentase ruang terbuka hijau yang dikelola	20%	20%	20%	21%	105,00	1,37%	21%	105,00
				Penataan RTH	Jumlah RTH yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	2 lokasi	2 lokasi	200,00

				Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Cakupan dokumen lingkungan hidup daerah yang tersedia	100%	80%	100%	100%	100,00	0%	100%	100,00
				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data dan informasi lingkungan	4 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	3 dokumen	75,00
				Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Data dan informasi lingkungan hidup yang disebarakan	4 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	2 dokumen	50,00
				Penyusunan dokumen lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersedia	6 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	0 dokumen	7 dokumen	116,67
				Penyusunan dokumen AMDAL	Jumlah dokumen lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150,00	0 dokumen	5 dokumen	250,00
				Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah dokumen Jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	100,00
				Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	67%	25%	67%	64%	95,52	7,16	64%	95,52

				Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah dokumen amdal, UKL-UPL, SPPL yang dipantau dan dibina	1.846 dokumen	870 dokumen	35 dokumen	173 dokumen	494,28	0 dokumen	1.043 dokumen	56,50
				Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang taat	262 buah	52 buah	3 buah	7 buah	233,33	5 buah	64 buah	24,43
				Penaatan hukum Lingkungan Hidup	Presentase penanganan kasus lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
				Identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Jumlah laporan penanganan pengaduan terhadap dugaan kerusakan lingkungan	75 laporan	24 laporan	3 laporan	10 laporan	333,33	2 laporan	36 laporan	48,00
				Kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Presentase mitra lingkungan dan masyarakat yang peduli lingkungan	40%	30%	35%	45%	128,57	0%	45%	112,50
				Pembinaan dan pengembangan kemitraan lingkungan	Jumlah mitra lingkungan yang dibina	51 kelompok	53 kelompok	15 kelompok	22 kelompok	146,67	0 kelompok	75 kelompok	147,06

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun 2021	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kualitas air (IKA)	-	-	54	55	56	56	42,01	41,50	30,71	61,04	50,00	61,15	
2	Indeks kualitas udara (IKU)	-	-	99,98	99,98	99,98	99,98	99,97	87,55	82,62	84,19	88,80	84,98	
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	-	-	70,67	70,74	70,82	70,82	80,59	80,59	80,59	89,12	89,12	89,12	
4	Indeks pencemaran status mutu air	-	-	-	-	-	-	5,75	5,85	6,93	7,16	2,59	2,59	
5.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	-	n.a	-	-	-	-	100	100	100	42,86	63,64	64,00	
6.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	-	n.a	-	-	-	-	100	100	100	100	80,00	100,00	
7.	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	-	n.a	-	-	-	-	0,05	9,60	14,63	14,33	14,22	14,23	

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Hal dimaksud dapat dilihat dalam beberapa regulasi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Selayar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disamping itu, Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai RPJMD 2016-2021 adalah “**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**”. Salah satu Misi sebagai langkah kongkrit untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu “**Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup**”. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah.

Kegiatan lingkungan yang telah diselenggarakan selama ini lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

peningkatan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan serta pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup kedepan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang teraiknya predikat Kabupaten Adipura melalui program perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), pengendalian limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan/izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal yang terkait dengan PPLH, peningkatan pendidikan/pelatihan/penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan.

Adapun hambatan internal yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, masih lemahnya system informasi yang memuat data base lingkungan serta sarana prasarana pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup yang belum memadai. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup serta kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih minim terhadap lingkungan.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih yang menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskan.
2. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat lingkungan hidup yang dilaksanakan BLHD Provinsi, PPE Sumapapua dan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkesinambungan;
3. Serta regulasi bidang lingkungan hidup yang jelas.

2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk lebih jelasnya, Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.10 sesuai Format terlampir pada Juknis.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Cat.
I	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Desa yang menjadi ibukota kecamatan, Desa Mekar Indah, Desa Patilereng, Desa Barugaiya, Kel. Benteng Utara, Kel. Benteng Selatan, Kel. Benteng.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pencegahan bahan pencemar sampah dan limbah B3	17 Buah	
B	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Desa yang menjadi ibukota kecamatan, Desa Bontolebang, Desa Lambego, Desa Menara Indah	Luas Lahan yang dipulihkan melalui metode rehabilitasi	14 Ha	Sukun
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Desa Bontosunggu	Luas Lahan yang dipulihkan melalui metode restorasi	1 Ha	Mangrove

II	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Desa yang menjadi ibukota kecamatan, Desa Bontolebang, Desa Pamatata, Desa Bontona Saluk, Desa Bontosunggu, Desa Bontotangnga, Desa Lambego	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola	17 Ha	Jati Super
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Desa Bontolempangan	Luas Taman Kehati Lainnya yang dikelola	0,2 Ha	
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kel. Benteng Utara, Desa Bontotangnga, Desa Labuang Pamajang	Jumlah mesin pemotong rumput	3 Buah	
III	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Desa Bontolebang, Kel. Batangmata Sapo, Desa Bontojati	Jumlah mitra yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan persampahan	3 Buah	

IV	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
A	Pengelolaan Sampah				
1	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Desa yang menjadi ibukota kecamatan, Desa Mekar Indah, Desa Patilereng, Desa Barugaiya, Desa Kembangragi, Desa Labuangpamajang,	Jumlah SRT-SSSRT yang terdaur ulang di sumber sampah	16 Ton	
2	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Desa yang menjadi ibukota kecamatan, Desa Mekar Indah, Desa Patilereng, Desa Barugaiya, Desa Kembangragi, Desa Labuangpamajang	Jumlah penanganan timbulan SRT-SSSRT	160 Ton	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Kec. Bontomanai	Jumlah Pusat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	1 Unit	
		Desa yang menjadi ibukota Kecamatan, Desa Kembangragi, Desa Labuangpamajang, Kel. Batangmata, Desa Barat Lambongan, Desa Tanete, Desa Bontosunggu, Desa Ujung, Desa Kahukahu, Desa Bontobaru, Desa Bontomalling, Desa Lowa, Desa Bontobulaeng, Desa Bontojati, Desa Bonea Timur	Jumlah Bank Sampah	25 Unit	
		Desa yang menjadi ibukota Kecamatan, Desa Kembangragi, Desa Labuangpamajang, Desa Pulo Madu, Desa Majapahit, Desa Barugaiya	Jumlah Motor Sampah Roda Tiga	16 Unit	

	Desa Kalepadang, Desa Ujung, Desa Lembangbaji, Desa Bontomalling, Desa Bontobulaeng, Desa Bontojati, Desa Bontobaru	Jumlah Rumah Kompos	7 Unit	
	Desa Bontoborusu, Desa Kaburu	Jumlah Mesin Pencacah Plastik	2 Unit	
	Desa Bontoborusu	Jumlah Mesin Press	1 Unit	
	Desa Kahukahu	Jumlah Tempat Sampah RT Terpilah	1000 Buah	
	Desa yang menjadi Ibukota Kecamatan, Kel. Benteng Utara	Jumlah Kontainer	12 Buah	
	Desa Bontomalling, Desa Bontojati, Desa Bontobaru, Desa Lembangbaji, Desa Bontobulaeng, Desa Kaburu	Jumlah mesin penghancur plastik	6 Unit	
	Desa Bontobulaeng, Desa Ujung, Desa Bontojati, Desa Labuangpamajang, Desa Kembang Ragi	Jumlah Am Roll	5 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan yang ideal harus mempunyai prinsip partisipatif karena masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya maka masyarakat juga harus turut serta dalam prosesnya melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. Sehingga fungsi perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2022.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran tentang realitas masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5

tahun ke depan. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan visi misi Bupati/Wakil Bupati dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran SKPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, mempunyai 11 (sebelas) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 103 (seratus tiga) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai Lampiran (sesuai Format terlampir pada Juknis).

Tabel 3.1 :
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			1	2	3	4		5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar									
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
211 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Internal DLH		100	12.940.760.000	DAU		100	14.141.352.000.000	
211 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja yang	Benteng	100	230.000.000	DAU		100	276.000.000	

						tersusun							
211	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Benteng	3 Dok	30.000.000,-	DAU			3 Dok	36.000.000
211	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Benteng	1 Dok	10.000.000,-	DAU			1 Dok	12.000.000
211	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P)	Benteng	1 Dok	10.000.000,-	DAU			1 Dok	12.000.000
211	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Benteng	1 Dok	10.000.000,-	DAU			1 Dok	12.000.000
211	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA-P)	Benteng	1 Dok	10.000.000,-	DAU			1 Dok	12.000.000
211	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (LAKIP/LPPD/LKPJ)	Benteng	3 Dok	30.000.000	DAU			3 Dok	36.000.000
211	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja	Jumlah	Dalam Daerah	13 Dok	130.000.000	DAU			13 Dok	156.000.000

				Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP dan RB (Cascading/PK /IKU/IKI/Rencana Aksi/MonevPK)							
211	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	Benteng	100%	4.142.000.000			100	4.270.400.000
211	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Selayar	39 Orang	4.000.000.000,-	DAU		39 Orang	4.100.000.000
211	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Benteng	1 Laporan	10.000.000,-	DAU		1 Laporan	12.000.000
211	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	Benteng	12 Laporan	120.000.000,-	DAU		12 Laporan	144.000.000
211	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Benteng	12 Laporan	12.000.000,-	DAU		12 Laporan	14.400.000
211	01	2.03		Administrasi	Persentase	Benteng	100%	82.000.000,-	DAU		100	100.000.000

					Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun							
211	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD dan RPBMD	Benteng	2 Laporan	2.000.000,-	DAU		2 Laporan	4.000.000
211	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Benteng	4 Laporan	40.000.000,-	DAU		4 Laporan	48.000.000
211	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset, (BI, KIR, KIB, CIL)	Benteng	4 Laporan	40.000.000,-	DAU		4 Laporan	48.000.000
211	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang Tersusun	Benteng	85,71%	323.760.000	DAU		85,71	388.512.000
211	01	2.04	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Persampahan	Benteng	1 Dokumen	10.000.000,-	DAU		1 Dokumen	12.000.000
211	01	2.04	04		Pendataan dan pendaftaran objek	Jumlah objek retribusi	Benteng	2176 Buah	21.760.000,-	DAU		2.176 Buah	26.112.000

					retribusi daerah	persampahan yang terdaftar							
211	01	2.04	05		Pengelolaan data retribusi daerah	Jumlah retribusi yang diterima dalam ratusan juta	Benteng	280	280.000.000,-	DAU		285	336.000.000
211	01	2.04	07		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi persampahan	Benteng	12 Laporan	12.000.000,-	DAU		12 Laporan	14.400.000
211	01	2.05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian DLH yang tersusun		100%	385.000.000	DAU		100	431.000.000
211	01	2.05	01		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah peralatan/mesin absensi	Benteng	1 Buah	12.000.000,-	DAU		1 Buah	12.000.000
211	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dan atribut aparatur	Benteng	350 Pasang	175.000.000,-	DAU		350 Pasang	182.000.000
211	01	2.05	03		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK,KGB,KP, KP4)	Benteng	4 Dokumen	35.000.000,-	DAU		4 Dok	40.000.000
211	01	2.05	04		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen SIMPEG (Anjab, rekap	Benteng	2 Dokumen	25.000.000,-	DAU		2 Dok	25.000.000

211	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah klipping bahan bacaan koran dan buku produk hukum terkait LH	Benteng	3 Buah	30.000.000,-	DAU		3 Buah	36.000.000
211	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu dinas	Benteng	500 Orang	50.000.000,-	DAU		500 Orang	60.000.000
211	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi DLH	Benteng	136 Laporan	272.000.000,-	DAU		136 Laporan	296.200.000
211	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah surat dinas yang diarsipkan	Benteng	500 Buah	22.000.000,-	DAU		500 Buah	26.000.000
211	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah wesite OPD	Benteng	1 Buah	50.000.000,-	DAU		1 Buah	50.000.000
211	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan LH	Benteng	33,33%	1.955.000.000	DAU		33,33	2.115.000.000
211	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah motor dinas	Benteng	5 Unit	75.000.000,-	DAU		5 Unit	75.000.000

						Jumlah mobil jabatan				DAU			
211	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan	Benteng	1 Unit	250.000.000,-	DAU		1 Unit	250.000.000	
211	01	2.07	03	Pengadaan alat besar	Jumlah alat berat	Benteng			DAU		1 Unit	1.000.000.000	
211	01	2.07	04	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah sepeda	Benteng			DAU		5 Unit	50.000.000	
211	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah meja kerja	Benteng	10 Buah	20.000.000,-	DAU		10 Buah	20.000.000	
					Jumlah kursi kerja		50 Buah	25.000.000,-	DAU		50 Buah	25.000.000,-	
211	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah AC	Benteng	5 Buah	50.000.000,-	DAU		5 Buah	50.000.000,-	
					Jumlah alat penyimpan arsip		10 Buah	50.000.000,-	DAU		10 Buah	50.000.000,-	
					Jumlah Laptop		5 Buah	100.000.000,-	DAU		5 Buah	100.000.000,-	
					Jumlah printer		10 Buah	25.000.000,-	DAU		10 Buah	25.000.000,-	
					Jumlah UPS				DAU		2 Unit	10.000.000	
					Jumlah Drone		2 Buah	20.000.000,-	DAU		2 Buah	20.000.000,-	
					Jumlah Camera		2 Buah	20.000.000,-	DAU		2 Buah	20.000.000,-	
					Jumlah GPS		2 Buah	20.000.000,-	DAU		2 Buah	20.000.000,-	
211	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung bangunan kantor	Benteng	1 Unit	1.000.000.000	DAU				
211	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan	Jumlah alat pengujian	Benteng	3 Unit	300.000.000,-	DAU		2 Unit	400.000.000,-	

					prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	laboratorium							
211	01	2.07	11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah mesin TPST/bank sampah	Benteng			DAU			
211	01	2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan jasa penunjang DLH		100%	3.170.000.000	DAU		100%	3.791.000.000
211	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Benteng	350 Buah	70.000.000,-	DAU		350 Buah	77.000.000,-
211	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik dan air	Benteng	3 Buah	60.000.000,-	DAU		3 Buah	66.000.000,-
211	01	2.08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Benteng			DAU			
211	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PHL sebagai pelayan umum DLH	Benteng	304 Orang	3.040.000.000,-	DAU		304 Orang	3.548.000.000,-
211	01	2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase BMD DLH yang terpelihara		16,31%	2.196.000.000	DAU		16,31%	2.263.240.000

					pemerintah daerah								
211	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Benteng	2 Unit	50.000.000,-	DAU		2 Unit	54.000.000,-	
					Jumlah motor dinas yang terpelihara		12 Unit	6.000.000,-	DAU		12 Unit	6.240.000,-	
211	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Benteng	40 Unit	1.300.000.000,-	DAU		40 Unit	1.352.000.000,-	
211	01	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	Jumlah alat berat yang terpelihara	Benteng	2 Unit	40.000.000,-	DAU		2 Unit	40.000.000,-	
211	01	2.09	04	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkut darat tak	Jumlah Gerobak yang terpelihara	Benteng			DAU				

					bermotor								
211	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan/mesin TPA/TPST yang terpelihara	Benteng	10 Unit	50.000.000,-	DAU		10 Unit	52.000.000,-	
211	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan TPA/TPST/LAB yang terpelihara	Benteng	5 Unit	500.000.000,-	DAU		5 Unit	500.000.000,-	
211	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan/mesin kantor yang terpelihara	Benteng	5 Unit	25.000.000,-	DAU		5 Unit	25.000.000,-	
211	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan/mesin laboratorium yang terpelihara	Benteng	5 Unit	25.000.000,-	DAU		5 Unit	30.000.000,-	
211	01	2.09	12	Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Jumlah lokasi yang ter rehabilitasi tanah	Benteng	2 Buah	200.000.000,-	DAU		2 Buah	200.000.000,-	
211	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana perlindungan dan	Selayar	12.50%	900.000.000	DAU		12.50%	550.000.000	

						pengelolaan LH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Kab							
211	02	2.01			Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase rekomendasi rencana PPLH terevaluasi	Selayar	12.50%	750.000.000	DAU		12.50%	400.000.000
211	02	2.01	01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dan ditetapkan	Selayar	1 Dokumen	750.000.000,-	DAU		1 Dokumen		300.000.000,-
					Jumlah dokumen IKLH	Selayar	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen		
					Jumlah dokumen IKPLHD	Selayar	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen		
211	02	2.01	02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RPPLH	Selayar			DAU		1 Dok		100.000.000
211	02	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Persentase instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan LH yang	Selayar	20%	150.000.000	DAU		20%		150.000.000

					terlaksana								
211	02	2.02	01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS RTR yang direviu	Selayar	1 Dokumen	50.000.000,-	DAU		1 Dokumen	50.000.000,-	
211	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang direviu	Selayar	1 Dokumen	50.000.000,-	DAU		1 Dokumen	50.000.000,-	
211	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk kajian rencana program	Selayar	1 Dokumen	50.000.000,-	DAU		1 Dokumen	50.000.000,-	
211	03			Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks pencemaran status mutu air	Selayar	2.59%	4.816.000.000	DAU		2.59%	4.816.000.000	
211	03	2.01		Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase pengujian yang memenuhi baku mutu	Selayar	10%	2.000.000.000	DAU		10%	2.000.000.000	
211	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pencegahan bahan pencemaran	Selayar	16 Buah	1.600.000.000,-	DAU		16 Buah	1.600.000.000,-	

					terhadap media tanah,air,udara dan laut	sampah dan limbah B3							
						Jumlah Sungai, pesisir laut, lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutunya	Selayar	25 Buah		DAU		25 Buah	
211	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah desa yang difasilitasi dalam aksi adaptasi, mitigasi dan perubahan iklim	Selayar	3 Buah	100.000.000,-	DAU		3 Buah	100.000.000,-	
211	03	2.01	03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Jumlah laporan hasil uji terhadap media tanah udara dan tanah	Selayar	50 Buah	300.000.000,-	DAU		50 Buah	300.000.000,-	
211	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase penanggulan gan pencemaran dan/atau kerusakan LH	Selayar	25%	591.000.000	DAU		25%	591.000.000	
211	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan	Jumlah informasi peringatan LH	Selayar	2 Buah	66.000.000,-	DAU		2 Buah	66.000.000,-	

					pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	terhadap sungai yang terkontaminasi bahan pencemar							
211	03	2.02	02		Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah sungai yang kadar polutannya diturunkan melalui bioremediasi	Selayar	5 Buah	500.000.000,-	DAU		5 Buah	500.000.000,-
211	03	2.02	03		Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah sungai yang pencemarannya dihentikan	Selayar	5 Buah	25.000.000,-	DAU		5 Buah	25.000.000,-
211	03	2.03			Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH	Selayar	0,047%	2.225.000.000	DAU		0,047%	2.475.000.000
211	03	2.03	01		Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah usaha/kegiatan sumber pencemar yang dihentikan proses produksinya	Selayar	1 Buah	50.000.000,-	DAU		1 Buah	50.000.000,-
211	03	2.03	02		Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Luas lahan yang dibersihkan unsur	Selayar	2 Ha	175.000.000,-	DAU		2 Ha	175.000.000,-

						pencemarannya							
211	03	2.03	03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	Luas lahan yang dipulihkan melalui teknologi remediasi	Selayar	1 Ha	500.000.000,-	DAU		1 Ha	500.000.000,-	
211	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Luas lahan yang dipulihkan melalui metode rehabilitasi	Selayar	10 Ha	1.000.000.000,-	DAU		10 Ha	1.000.000.000,-	
211	03	2.03	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Luas lahan yang dipulihkan melalui metode restorasi	Selayar	3 Ha	500.000.000,-	DAU		3 Ha	750.000.000,-	
211	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Selayar	1.38%	3.915.000.000	DAU		1.38%	3.915.000.000	
211	04	2.01		Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Persentase taman keanekaragaman hayati yang dikelola	Selayar	2.31%	3.915.000.000	DAU		2.31%	3.915.000.000	
211	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan KEHATI	Selayar	1 Dokumen	600.000.000,-	DAU		1 Dokumen	600.000.000,-	

				hayati									
211	04	2.01	02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Luas tumbuhan lokal, endemik yang penyerbukan oleh satwa terselamatkan dari ancaman kepunahan	Selayar	3 Ha	300.000.000,-	DAU		3 Ha	300.000.000,-	
211	04	2.01	03	Pengelolaan kebun raya	Luas koleksi tumbuhan untuk kepentingan penelitian	Selayar	5 Ha	500.000.000,-	DAU		5 Ha	500.000.000,-	
211	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)	Luas ruang terbuka hijau publik yang dikelola	Selayar	20 Ha	1.858.000.000,-	DAU		20 Ha	1.858.000.000,-	
211	04	2.01	05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola	Selayar	0,42 Ha	52.000.000,-	DAU		0,42 Ha	52.000.000,-	
211	04	2.01	06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah usaha tani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan KEHATI	Selayar	10 Buah	50.000.000,-	DAU		10 Buah	50.000.000,-	
211	04	2.01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman	Jumlah sarpras taman KEHATI	Selayar	5 Unit	500.000.000,-	DAU		5 Unit	500.000.000,-	

					hayati								
						Jumlah mesin pemotong rumput	Selayar	11 Buah	55.000.000,-	DAU		11 Buah	55.000.000,-
211	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikendalikan	Selayar	9,25%	60.000.000	DAU		9,25%	60.000.000
211	05	2.01			Penyimpanan sementara limbah B3	Persentase limbah B3 yang disimpan sementara	Selayar	9,25%	50.000.000	DAU		9,25%	50.000.000
211	05	2.01	01		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3	Selayar	5 Buah	25.000.000,-	DAU		5 Buah	25.000.000,-
211	05	2.01	02		Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penyimpan	Selayar	5 Buah	25.000.000,-	DAU		5 Buah	25.000.000,-

					persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	sementara limbah B3 Yang divalidasi lapangan							
211	05	2.02			Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan	Selayar	9,25%	10.000.000	DAU		9,25%	10.000.000
211	05	2.02	01		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi pemenuhan izin pengumpul limbah B3	Selayar	1 Buah	5.000.000,-	DAU		1 Buah	5.000.000,-
211	05	2.02	02		Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah limbah B3 yang diangkut untuk diolah pada insenerator	Selayar	400 ton	5.000.000,-	DAU		400 ton	5.000.000,-

211	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Selayar	64,00%	396.000.000	DAU	64,00%	624.000.000
211	06	2.01		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Rasio pejabat pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemda	Selayar	1,33%	396.000.000	DAU	1,33%	624.000.000
211	06	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah dokumen AMDAL yang dinilai	Selayar	1 Dokumen	141.000.000,-	DAU	1 Dokumen	169.200.000,-
					Jumlah dokumen UKL-UPL yang diperiksa	Selayar	10 Dokumen		DAU	10 Dokumen	
					Jumlah	Selayar	130		DAU	130	

						dokumen SPPL yang diperiksa		Dokumen				Dokumen	
211	06	2.01	02	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah pejabat pengawas LH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Selayar	5 Orang	100.000.000,-	DAU			15 Orang	300.000.000,-
211	06	2.01	03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai izin lingkungan terawasi	Selayar	15 Buah	105.000.000,-	DAU			15 Buah	105.000.000,-
211	06	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif terhadap ketidaktaatan PPLH	Selayar	1 Buah	50.000.000,-	DAU			1 Buah	50.000.000,-
211	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT	Persentase MHA, kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	Selayar	1,14%	70.000.000	DAU			2,27%	75.000.000

					DENGAN PPLH								
211	07	2.01			Pengakuan MHA kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional terkait PPLH yang diakui	Selayar	11,36%	60.000.000	DAU		11,36%	60.000.000
211	07	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat hukum adat, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH yang diakui	Selayar	1 Buah	60.000.000,-	DAU		1 Buah	60.000.000,-	
211	07	2.02			Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina	Selayar	100%	10.000.000	DAU		100%	15.000.000
211	07	2.02	01	Pemberdayaan kemitraan, pendampingan dan penguatan	Jumlah MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH	Selayar	1 buah	10.000.000,-	DAU		1 buah	15.000.000,-	

				kelembagaan MHA, kerifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pendampingan							
211	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Selayar	23,08%	600.000.000	DAU		23,08%	600.000.000
211	08	2.01		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Selayar	100%	600.000.000	DAU		100%	600.000.000
211	08	2.01	01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah mitra yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan persampahan	Selayar	10 Buah	100.000.000,-	DAU		10 Buah	100.000.000,-
211	08	2.01	02	Pendampingan	Jumlah mitra	Selayar	80 Buah	400.000.000,-	DAU		80 Buah	400.000.000,-

				gerakan peduli lingkungan hidup	yang mendapat pendampingan gerakan peduli lingkungan							
211	08	2.01	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan lingkungan	Selayar	100 Orang	100.000.000,-	DAU		100 Orang	100.000.000,-
211	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang berprestasi	Selayar	33,33%	20.000.000	DAU		33,33%	24.000.000
211	09	2.01		Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten	Selayar	15,00%	20.000.000	DAU		15,00%	24.000.000
211	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia	Jumlah lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia	Selayar	20 Buah	20.000.000,-	DAU		20 Buah	24.000.000,-

				pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	pendidikan yang dinilai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
211	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan	Selayar	100%	35.000.000	DAU		100%	35.000.000
211	10	2.01		Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Persentase pengaduan/kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	Selayar	100%	35.000.000	DAU		100%	35.000.000
211	10	2.01	01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Jumlah pengaduan/kasus lingkungan yang diregistrasi	Selayar	1 Buah	10.000.000,-	DAU		1 Buah	10.000.000,-
211	10	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan	Jumlah pengaduan/kasus lingkungan yang divalidasi	Selayar	1 buah	25.000.000,-	DAU		1 buah	25.000.000,-

					lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan								
211	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang bernilai ekonomi	Selayar	1,30%	27.150.500.000	DAU		1,30%	22.278.100.000
211	11	2.01			Pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	Selayar	14,23%	27.060.500.000	DAU		14,23%	22.184.900.000
211	11	2.01	01	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen jastrada pengelolaan sampah	Selayar	1 Dokumen	50.000.000,-	DAU		1 Dokumen	50.000.000,-	
211	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah pengurangan timbulan SRT-SSSRT	Selayar	1 Ton	549.000.000,-	DAU		1 Ton	658.800.000,-	
					Jumlah SRT-SSSRT yang terdaur ulang di sumber sampah	Selayar	633 Ton		DAU		633 Ton		
					Jumlah SRT-SSSRT yang termanfaatkan	Selayar	1 Ton		DAU		1 Ton		

						kembali di sumber sampah							
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah penanganan timbulan SRT-SSSRT	Selayar	6000 Ton	5.449.000.000,-	DAU		6000 Ton	6.538.800.000,-
						Jumlah SRT-SSSRT yang terpilah di sumber sampah		1 Ton		DAU		1 Ton	
						Jumlah SRT-SSSRT yang terangkut ke TPA		5475 Ton		DAU		5475 Ton	
						Jumlah SRT-SSSRT yang terangkut ke pusat TPST untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi		1 Ton		DAU		1 Ton	
						Jumlah SRT-SSSRT yang terolah menjadi bahan		0,5 Ton		DAU		0,5 Ton	

						baku								
						Jumlah SRT-SSRT yang dimanfaatkan menjadi sumber energi		0,5 Ton		DAU		0,5 Ton		
						Jumlah SRT-SSRT yang terproses di TPA		5475 Ton		DAU		5475 Ton		
						Jumlah kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah		100000 M3		DAU		100000 M3		
						Jumlah daya tampung TPS terhadap volume sampah		190 M3		DAU		190 M3		
211	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai bank sampah aktif	Selayar	11 Buah	55.000.000,-		DAU		11 Buah	57.200.000,-	
211	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah saran prasarana yang dikoordinasikan penganggarnya melalui DAK/APBN/AP	Selayar	3 unit	110.000.000,-		DAU		3 unit	132.000.000,-	

						Jumlah bangunan pendukung TPA/TPST		1 Unit	500.000.000,-	DAU/DAK		1 Unit	500.000.000,-
						Jumlah perlengkapan peralatan TPA/TPST		1 Unir	300.000.000,-	DAU/DAK		1 Unir	300.000.000,-
						Jumlah alat pelindung diri petugas TPA/TPST		110 Buah	110.000.000,-	DAU/DAK		110 Buah	110.000.000,-
						Jumlah lokasi tempat penampungan sementara (TPS)		1 Buah	200.000.000,-	DAU/DAK		1 Buah	200.000.000,-
						Jumlah tempat sampah RT terpilah		1000 Buah	500.000.000,-	DAU/DAK		1000 Buah	500.000.000,-
211	11	2.02			Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Persentase pengelola sampah swasta yang mempunyai izin	Selayar	9,09%	10.000.000	DAU		9,09%	10.000.000
211	11	2.02	01	Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Jumlah pelayanan terhadap penerbitan izin	Selayar	11 Buah	10.000.000,-	DAU			11 Buah	10.000.000,-

					secara elektronik	pengelola sampah							
211	11	2.03			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Persentase pengelola sampah swasta yang taat	Selayar	9,09%	80.000.000	DAU		18,18%	83.200.000
211	11	2.03	01		Fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah pengelola sampah yang memenuhi prasyarat penerbitan izin	Selayar	11 Buah	10.000.000,-	DAU		11 Buah	13.200.000,-
211	11	2.03	02		Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Selayar	1 Dokumen	20.000.000,-	DAU		1 Dokumen	20.000.000,-
211	11	2.03	03		Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pengelolaan sampah	Selayar	1 Dokumen	50.000.000,-	DAU		1 Dokumen	50.000.000,-
									50.903.260.000				47.368.652.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program DLH Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penataan kepegawaian dan pelayanan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya terhadap keselamatan pekerja, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Kegiatan :

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem dalam keanekaragaman hayati masing-masing species yang dapat membantu keberlanjutan alam.

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

Kegiatan :

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Program ini dimaksudkan untuk menginventarisasi tradisi atau pengetahuan local tentang hal-hal tabu (rahasia) dan sakral dalam pelestarian fungsi atau pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kegiatan :

- a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola usaha di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup dan/atau telah berhasil mengembangkan usaha bidang lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi awal, menilai sifat pengaduan dan/atau masalah serta menindaklanjuti setiap keluhan atau konflik lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Dari berbagai program yang direncanakan Tahun 2022, terdapat 10 program yang termasuk urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan non dasar dan 1 program yang terfokus pada penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 membutuhkan dana/pagu indikatif sebanyak Rp.50.903.260.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

BAB V

PENUTUP

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penambahan kuantitas aparatur lingkungan hidup melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional serta pengangkatan pegawai baru;
4. Penataan dan penyempurnaan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan kegiatan yang mempunyai dampak secara langsung kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2022.

Benteng, 20 Maret 2021

Plt. KEPALA DLH,

H. MUHAMMAD HASDAR, SKM, M.Kes.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19620906 198302 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN 2020	6
2.1. EVALUASI PELAKS. RENJA & CAPAIAN RENSTRA	6
2.2. ISU-ISU PENTING PENYEL. TUGAS & FUNGSI.....	24
2.3. PENELAAHAN USULAN PROG. & KEG. MASY.....	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN.....	30
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	30
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH.....	30
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	31
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH	41
BAB V : PENUTUP	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin !

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 20 Maret 2021
Pit. KEPALA DLH,

H. MUHAMMAD HASDAR, SKM, M.Kes.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19620906 198302 1 007

RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR